

**Tinjauan tentang kekuatan pembuktian
kesaksian yang berdiri sendiri
dalam proses persidangan**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Guna Memperoleh Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta**

Oleh:

SOTYO BAHTIAR

NIM: E 0002237

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2006**

PERSETUJUAN

Penulisan Hukum (Skripsi) ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi

Bambang Santoso, S.H., M. Hum.

NIP. 131 863 797

PENGESAHAN

Penulisan Hukum (Skripsi) ini telah diterima dan dipertahankan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :
Hari : Selasa
Tanggal : 4 April 2006

DEWAN PENGUJI

- (1)..... (Bambang Santoso, S.H., M.Hum.)
(2)..... (Edy Herdyanto, S.H., M.H.)
(3)..... (Kristyadi, S.H., M.Hum)

Mengetahui
Dekan

(Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.)

NIP. 131 793 333

MOTTO

- ❖ *Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.*

(Ar-Ra'd: 6),

- ❖ *Lihatlah apa yang dikatakan jangan melihat siapa yang mengatakan.*

(Saiyidina Ali)

- ❖ *Hadapilah apa yang ada di depan kamu, jangan pikirkan apa yang ada jauh di sana.....*

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya tulis ini untuk:

✧ ***Bapak Ibu ku Tercinta***

Terima kasih ya Allah, aku telah diberi orang tua seperti mereka

Terima kasih atas segala ketulusan dan kasih sayang mu....

Terima kasih atas semua do'a dan kesabarannya.....

Maaf aku telah banyak merepotkan bapak dan ibu..

✧ ***Kakak-ku tercinta Mbak Hendry & Mas Didik***

Terima kasih atas semua kebaikan dan kesabaran kalian

✧ ***Semua teman teman-ku***

Terima kasih atas semua bantuanya

✧ ***Buat seseorang yang telah menemani hari-hari ku dalam kesunyian***

I love u

✧ ***Almamater ku***

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kelapangan dan kemudahan di dalam penulisan hukum ini serta dengan mengucap syukur alhamdulillah, penulisan hukum (skripsi) yang berjudul “TINJAUAN TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN KESAKSIAN YANG BERDIRI SENDIRI DALAM PROSES PERSIDANGAN” dapat Penulis selesaikan.

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana nilai kekuatan pembuktian kesaksian yang berdiri sendiri dalam proses persidangan, serta untuk mengetahui bagaimana tindakan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap adanya kesaksian yang berdiri sendiri dalam pemeriksaan di persidangan.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian penulisan hukum ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Atas jasa besar yang diberikan selama penyusunan penulisan hukum ini, maka perkenankanlah penulis untuk menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Bambang Santoso, S.H, M.Hum, selaku Pembimbing Penulisan Hukum (Skripsi) yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan pengarahan yang sangat berarti dan sangat mendukung dalam proses penyelesaian Penulisan Hukum (Skripsi) ini ;
3. Bapak Edy herdyanto, S.H, M.H, selaku Pembimbing Akademis, yang telah memberikan nasehat, motivasi dan ilmu yang berguna bagi penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah menyalurkan pengetahuan dibidang ilmu hukum kepada penulis

sehingga dapat menjadi bekal dalam penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini dan semoga dapat segera penulis amalkan.

5. Seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang turut membantu memperlancar proses belajar mengajar ;
6. Bapak Suroso, S.H, selaku Ketua Pengadilan Negeri Surakarta yang telah memberi ijin untuk melakukan penelitian dan memperoleh data-data yang penulis butuhkan.
7. Bapak Praksono, S.H, selaku Hakim Pembimbing yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dalam melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta.
8. Bapak Agus Mulyadi, S.H, beserta seluruh staf Pengadilan Negeri Surakarta yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian.
9. Bapak dan Ibu yang dengan penuh kesabaran telah mendidik, membesarkan dan memberi kasih sayang, do'a serta dukungan yang sangat besar yang tidak mungkin dapat terbalaskan dengan apapun.... Semoga saya dapat membahagiakan kalian....
10. Kakakku yang manis “Mbak Hendri & Mas Tatak” serta Keponakan kecilku yang lucu “ Thoriq Eka Wibowo “ (Cepet gedhe Le), yang telah memberiku semangat yang sangat besar untuk dapat menyelesaikan kuliah ini....
11. Mas Didik, maaf ya Mas kalo aku sering kurang ajar.... Yang pasti makasih banget telah memberiku semangat untuk menyelesaikan kuliah ini.....
12. Keluargaku Mranggen Mbah Harto (Makasih Mbah atas do'a dan uang sakunya), Om Madi, Lek Lami, Lek Di & Mbak Ira, Lek Eni & Lek Bidin, Lek Sigit, Lek Seno & Mbak Yuli, Dian, Fitri, Sapto, Yoga, Ajik, Kiki (Makasih atas do'a serta dukungan kalian).....
13. Sayangku yang telah banyak menemani hari-hariku dan memberi warna hidupku “I LOVE U banget n Makasih ya Yang atas smuanya”.
14. Teman-temanku semua di Fakultas Hukum '02, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, makasih atas semua bantuan kalian..iLove U all. dan buat Mas Eko “Juragane Parkiran Timur” makasih banget mas atas semua bantuanya.

15. Teman-teman kost yang telah banyak memberi warna hari-hariku selama di Solo, makasih banget dan yang pasti Sorry banget.....
16. AD 5524 AJ yang telah setia, mengantarku kemanapun akau pergi.....
17. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis, yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu.

Mengingat keterbatasan kemampuan diri penulis, penulis sadar bahwa penulisan hukum (skripsi) ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sangat penulis harapkan.

Akhir kata penulis berharap semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk perkembangan hukum acara pidana, kalangan akademisi, praktisi serta masyarakat umum.

Surakarta, 12 Januari 2006

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	7
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Lokasi Peneltian.....	9
3. Jenis Data	9
Sumber Data.....	10
Teknik Pengumpulan Data.....	10
4. Teknik Analisis Data.....	11
F. Sisitematika Penulisan Hukum	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	15
1. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian dan Alat Bukti.....	15
a. Pengertisn Pembuktian.....	15
b. Prinsip Pembuktian	16

c. Sistem Pembuktian.....	19
d. Alat Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Hukum Acara Pidana	23
2. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti Keterangan Saksi	27
a. Dasar Hukum Alat Bukti Keterangan Saksi	27
b. Pengertian Saksi Dan Alat Bukti Keterangan Saksi	27
c. Syarat Sahnya Alat Bukti Keterangan Saksi.....	28
d. Cara Menilai Kebanaran Alat Bukti Keterangan Saksi	31
e. Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi	32
f. Kewajiban Saksi.....	37
g. Jenis-Jenis Saksi.....	40
B. Kerangka Pemikiran.....	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Yang Berdiri Sendiri Dalam Proses Persidangan	43
1. Duduk Perkara.....	43
a. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor : 54/Pid.S/1983/PN.Sbr.....	43
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	44
c. Putusan dan Pertimbangan Hukumnya	44
2. Pembahasan.....	53
B. Tindakan Hakim Untuk Mengambil Putusan Terhadap Adanya Kesaksian Yang Berdiri Sendiri Dalam Proses Persidangan	60
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

	Halaman
GAMBAR	
Gambar 1	Komponen-Komponen Analisis Data (Model Interaktif)..... 12
Gambar 2	Bagan Alur Kerangka Pemikiran..... 41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	I	Surat Permohonan Ijin Penelitian.
Lampiran	II	Surat Keterangan Penelitian.

ABSTRAK

SOTYO BAHTIAR, E 0002237, TINJAUAN TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN KESAKSIAN YANG BERDIRI SENDIRI DALAM PROSES PERSIDANGAN. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum (Skripsi). 2006.

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian kesaksian yang berdiri sendiri dalam proses persidangan, serta mengetahui bagaimana tindakan hakim untuk mengambil putusan terhadap adanya kesaksian yang berdiri sendiri dalam proses persidangan.

Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian normatif dan empiris, yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk dalam penelitian hukum sosiologis. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan meliputi: wawancara dan studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan sebagainya. Analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif dengan metode interaktif.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa kekuatan pembuktian kesaksian yang berdiri sendiri, dimana antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain tidak saling berhubungan atau tidak bersesuaian sehingga tidak dapat menyimpulkan adanya suatu peristiwa atau keadaan tertentu dan tidak dapat pula menyimpulkan siapa pelakunya, maka kesaksian seperti ini tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Karena kesaksian yang demikian dapat digolongkan sebagai saksi tunggal atau *unus testis nulus testis* (satu saksi bukan saksi). Tindakan hakim untuk mengambil putusan terhadap adanya kesaksian yang berdiri sendiri dalam proses persidangan adalah hakim akan mencari alat-alat bukti lain yang sah untuk memenuhi batas minimum pembuktian, yang nantinya akan dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Jadi bukan berarti bahwa apabila dalam proses persidangan terdapat kesaksian yang berdiri sendiri lantas hakim memutuskan terdakwa tidak bersalah. Karena walaupun dalam persidangan terdapat kesaksian yang berdiri sendiri dimana kesaksian semacam ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian, akan tetapi masih ada alat bukti lain yang mungkin mempunyai nilai kekuatan pembuktian sehingga dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.

Implikasi teoritis penelitian ini adalah bahwa secara yuridis keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah bahwa dengan adanya kesaksian yang berdiri sendiri dalam persidangan, dapat digunakan hakim sebagai petunjuk dalam membuktikan kesalahan terdakwa di sidang pengadilan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Hukum merupakan suatu norma/kaidah yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang menjamin hak dan kewajiban perorangan maupun masyarakat. Dengan adanya hukum dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam rangka menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan memberikan perhatian terhadap penciptaan keadilan dalam masyarakat, hukum tidak selalu bisa memberikan keputusannya dengan segera, hukum membutuhkan waktu untuk menimbang-nimbang yang bisa memakan waktu lama sekali, guna mencapai keputusan yang seadil-adilnya dan tidak merugikan masyarakat. Tujuan dari adanya hukum adalah memberikan pelayanan bagi masyarakat agar tercipta suatu ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan. Oleh karena itu para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya haruslah memperhatikan kepentingan masyarakat dan selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada.

Sebagai negara hukum, negara Indonesia memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, antara lain adalah hukum pidana dan hukum acara pidana. Kedua hukum ini mempunyai hubungan yang sangat erat. Hukum acara pidana mengatur cara-cara bagaimana negara menggunakan haknya untuk melakukan penghukuman dalam perkara – perkara yang terjadi (hukum pidana formal). Hukum Acara Pidana merupakan suatu sistem kaidah atau norma yang diberlakukan oleh negara, dalam hal ini oleh kekuasaan kehakiman, untuk melaksanakan Hukum Pidana (materiil). Dengan demikian suatu Hukum Acara Pidana dapat dikatakan baik apabila Hukum Pidana dapat terealisasi dengan baik (Djoko Prakoso, 1988: 1).

Ruang lingkup Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat dalam Pasal 2 KUHAP yang berbunyi: “*Undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan*”. Jadi apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang maka dalam menyelesaikan perkara tersebut baik dari proses penyidikan sampai pada proses persidangan di pengadilan para penegak hukum haruslah berpedoman pada aturan-aturan dalam KUHAP. Apa yang diatur dalam hukum acara pidana adalah

cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat, namun sekaligus juga melindungi hak asasi tiap-tiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum (Moch. Faisal Salam, 2001: 1).

Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah: “untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.

Untuk mengetahui apakah seseorang bersalah atau tidak terhadap perkara yang didakwakan, bukan merupakan hal yang mudah. Hal tersebut harus dengan dibuktikan alat-alat bukti yang cukup. Untuk membuktikan bersalah tidaknya seseorang terdakwa haruslah melalui proses pemeriksaan di depan sidang pengadilan (Darwan Prinst, 1998: 1320). Dan untuk membuktikan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan diperlukan adanya suatu pembuktian.

Dalam pembuktian ini, hakim perlu memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti bahwa seseorang yang telah melanggar ketentuan pidana atau undang-undang pidana lainnya, harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Sedangkan kepentingan terdakwa berarti bahwa terdakwa harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa, sehingga tidak ada seorang yang tidak bersalah mendapat hukuman. Dan bila memang terbukti bersalah maka hukuman itu harus seimbang dengan kesalahannya.

Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan, dan hanya dengan pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana. Sehingga apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman, dan sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan pidana. Oleh karena itu hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Menilai sampai mana batas minimum “kekuatan pembuktian” atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penafsiran atau pengertian mengenai pembuktian baik pada Pasal 1 yang terdiri dari 32 butir pengertian, maupun pada penjelasan umum dan penjelasan Pasal demi Pasal. KUHAP hanya memuat macam-macam alat bukti

yang sah menurut hukum acara pidana di Indonesia.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (M. Yahya Harahap, 2000: 273).

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, jenis alat bukti yang sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti adalah :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Maksud penyebutan alat-alat bukti dengan urutan pertama pada keterangan saksi, selanjutnya keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa pada urutan terakhir, menunjukkan bahwa pembuktian (*bewijsvoering*) dalam hukum acara pidana diutamakan pada kesaksian. Namun perihal nilai alat-alat bukti yang disebut oleh Pasal 184 KUHAP tetap mempunyai kekuatan bukti (*bewijskracht*) yang sama penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa.

Alat bukti keterangan saksi dalam hukum acara pidana merupakan hal yang sangat penting dan diutamakan dalam membuktikan kesalahan terdakwa, maka disini hakim harus sangat cermat, teliti dalam menilai alat bukti keterangan saksi ini. Karena dengan alat bukti keterangan saksi ini akan lebih mengungkap peristiwanya. Tidak selamanya keterangan saksi dapat sah menjadi alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian dalam pemeriksaan di persidangan. Ada syarat-syarat yang harus di penuhi agar alat bukti keterangan saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Keterangan saksi agar dapat menjadi alat bukti yang sah harus memenuhi beberapa persyaratan (M. Yahya harahap, 2000: 265-268), yaitu:

1. Keterangan saksi yang diberikan harus diucapkan diatas sumpah, hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP.
2. Keterangan saksi yang diberikan dipengadilan adalah apa yang saksi lihat sendiri, dengar sendiri dan dialami sendiri oleh saksi. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP.
3. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan, hal ini sesuai dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP.
4. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup, agar

mempunyai kekuatan pembuktian maka keterangan seorang saksi harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain. Hal ini sesuai dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP.

5. Keterangan para saksi yang dihadirkan dalam sidang pengadilan mempunyai saling hubungan atau keterkaitan serta saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu, hal ini sesuai dengan Pasal 185 ayat (4) KUHAP.

Dengan demikian berarti apabila alat bukti keterangan saksi tidak memenuhi persyaratan seperti disebutkan di atas, maka keterangan saksi tersebut tidak sah sebagai alat bukti dengan demikian tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Dari syarat sahnya keterangan saksi agar mempunyai nilai kekuatan pembuktian, salah satunya disebutkan bahwa antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain harus mempunyai saling hubungan atau keterkaitan serta saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu. Tapi bagaimana apabila keterangan dari beberapa saksi yang dihadirkan di sidang pengadilan saling “berdiri-sendiri”, maksudnya adalah bahwa keterangan antara saksi yang satu dengan saksi yang lain di sidang pengadilan tidak terdapat kesesuaian atau tidak ada keterkaitan atau hubungan yang dapat mewujudkan suatu kebenaran akan adanya kejadian atau keadaan tertentu. Lalu bagaimana kekuatan pembuktian dari kesaksian yang berdiri-sendiri tersebut?

Berdasarkan hal tersebut diatas, yaitu persoalan yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian kesaksian yang berdiri-sendiri, maka penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian sebagai bahan penulisan hukum yang mempunyai

judul: **“TINJAUAN TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN KESAKSIAN YANG BERDIRI SENDIRI DALAM PROSES PERSIDANGAN”**

B. Perumusan Masalah

Untuk dapat memperjelas tentang permasalahan yang ada agar pembahasannya lebih terarah dan sesuai dengan tujuan serta sasaran yang diharapkan, maka penting sekali adanya perumusan masalah yang akan dibahas.

Perumusan masalah akan memudahkan penulis dalam pengumpulan data, menyusun data dan menganalisisnya, sehingga penelitian dapat dilakukan secara mendalam dan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan. Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kekuatan pembuktian kesaksian yang berdiri sendiri dalam proses persidangan ?
2. Bagaimana tindakan hakim untuk mengambil putusan terhadap adanya kesaksian yang berdiri sendiri dalam proses persidangan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu target yang ingin dicapai dalam suatu penelitian sebagai suatu solusi atas masalah yang dihadapi (tujuan obyektif), maupun untuk memenuhi kebutuhan perorangan (tujuan subyektif). Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian dari kesaksian yang berdiri sendiri dalam proses persidangan.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana tindakan hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap adanya kesaksian yang berdiri sendiri dalam proses persidangan.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar sarjana S1 dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta,
 - b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis khususnya mengenai kekuatan pembuktian dari kesaksian yang berdiri sendiri dalam proses persidangan terhadap putusan pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, serta untuk mengetahui kekuatan pembuktian dari kesaksian yang berdiri sendiri dalam proses persidangan terhadap putusan pengadilan.
- b. Dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai literatur atau bahan – bahan informasi ilmiah.

2. Manfaat praktis

- a. Sebagai sarana untuk menambah wawasan bagi para pembaca mengenai kekuatan pembuktian dari kesaksian yang berdiri sendiri dalam proses persidangan terhadap putusan pengadilan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dan sebagai bahan informasi dalam kaitanya dengan pertimbangan yang menyangkut masalah ini

E. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. (Sutrisno Hadi, 2002 : 4).

Dengan demikian pengertian metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa.

Beberapa hal yang menjadi bagian dari metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisis data – data, studi kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Selain itu dalam penulisan hukum ini penulis juga menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris (*sosiolegal research*). Pada penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 1986: 52).

Di dalam penelitian hukum ini, penulis melakukan penelitian dengan melakukan wawancara terhadap hakim berkaitan dengan adanya keterangan

saksi yang berdiri dalam persidangan Pengadilan (dalam hal ini hakim di Pengadilan Negeri Surakarta), kemudian melakukan analisis terhadap hasil penelitian tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta literatur-literatur.

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang keterangan saksi yang berdiri sendiri dalam persidangan. Selain itu, bersifat kualitatif karena memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku (Burhan Ashshofa, 2001: 20-210). Sehingga dapat diperoleh data kualitatif yang merupakan sumber dari deskripsi yang luas, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Dengan demikian alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab-akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat.

2. Lokasi penelitian.

Lokasi penelitian ditetapkan dengan tujuan agar ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti lebih sempit dan terfokus, sehingga penelitian yang dilakukan lebih terarah.

Penelitian hukum ini mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Surakarta yang beralamat di Jalan Brigadir Jenderal Slamet Riyadi Nomor 290 Surakarta.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari narasumber yang ada di lapangan dengan tujuan agar penelitian ini bisa mendapatkan hasil yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Dalam hal ini data diperoleh dari hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Surakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung data primer, data ini diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan studi dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

4. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian hukum (skripsi) ini adalah :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data atau keterangan yang diperoleh langsung dari semua pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

Dalam hal ini yang menjadi narasumber adalah Hakim Pengadilan Negeri Surakarta.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penulisan hukum (skripsi) ini diperoleh dari:

- 1) Bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan (*reglement*).
- 2) Bahan hukum sekunder yang meliputi bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti bahan-bahan kepustakaan, dokumen, arsip, artikel, makalah, literatur, majalah serta surat kabar.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu (Burhan Ashshofa, 2001: 95), dalam hal ini wawancara dilakukan dengan tujuan memperoleh keterangan-keterangan yang jelas tentang hal-hal yang berkaitan dengan adanya keterangan saksi yang berdiri sendiri dalam proses persidangan. Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan

yang berbeda, yaitu pencari informasi yang biasa disebut dengan pewawancara atau interviewer, dalam hal ini adalah penulis. Dalam pihak lain adalah informan atau responden, dalam hal ini adalah hakim-hakim Pengadilan Negeri Surakarta.

Teknik pelaksanaan wawancara adalah dengan wawancara tidak berencana (tidak berpatokan), yakni penulis dalam mengajukan pertanyaan tidak terikat pada aturan-aturan yang ketat. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan.

b. Penelitian Kepustakaan

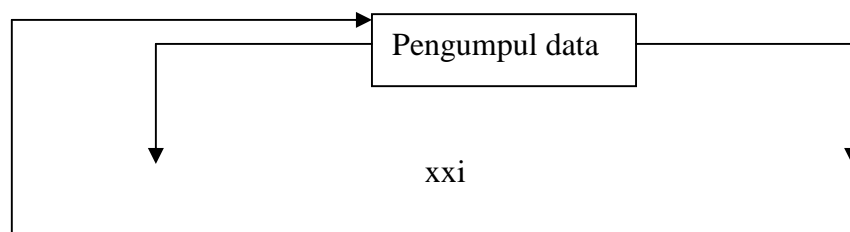
Penelitian kepustakaan meliputi pengkajian terhadap bahan-bahan pustaka atau materi yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.

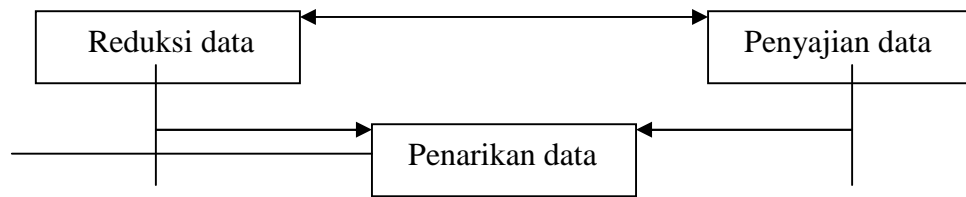
7. Tehnik analisis Data dan Model Analisis

Tehnik analisis data adalah suatu uraian tentang cara – cara analisis, yaitu kegiatan mengumpulkan data kemudian diedit dahulu, untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan analisis yang sifatnya kualitatif. Analisis kualitatif ini menghasilkan data deskriptif yang merupakan kata – kata , tulisan atau uraian dari orang lain dan perilaku yang diamati. (Maria W.W Sumarjono, 1989 : 16)

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian terkumpul maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif model interaktif (*interactive model of analysis*). Pengertian model interaktif tersebut adalah bahwa data yang terkumpul akan dianalisis melalui tiga tahap, yaitu : mereduksi data, menyajikan data, dan kemudian menarik kesimpulan. Selain itu, dilakukan pula proses siklus antara tahap – tahap tersebut, sehingga data yang terkumpulkan berhubungan satu dengan lainnya secara sistematis. (HB. Sutopo, 1991 : 13)

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam skema di bawah ini :





ambar 1 : Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif (H.B. Sutopo, 2002: 96).

Kegiatan komponen itu dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Reduksi Data

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian kepada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis dikepastakaan. Reduksi tersebut berlangsung terus menerus bahkan sebelum data benar – benar terkumpul sampai sesudah penelitian dan laporan akhir lengkap tersusun.

- Penyajian Data

Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

- Penarikan Kesimpulan

Dari permulaan pengumpulan data seorang penganalisis mulai mencari arti benda – benda, mencatat keteraturan, pola – pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab – akibat dan proporsi. Kesimpulan – kesimpulan tetap akan ditangani dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula – mula belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci dan mengarah pada pokok. Kesimpulan – kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penulis selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan – catatan, atau mungkin menjadi seksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali. (Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 1992 : 19)

Peneliti harus bergerak diantara keempat sumbu kumparan itu selama pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak – balik diantara kegiatan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan / verifikasi selama sisa waktu penelitiannya. Aktivitas yang dilakukan dengan proses itu komponen – komponen tersebut akan didapat yang benar – benar mewakili dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data yang diperoleh. Setelah semua data dikumpulkan, kemudian direduksi yang berupa klasifikasi dan seleksi. Kemudian kita ambil kesimpulan dan langkah

tersebut tidak harus urut tetapi berhubungan terus sehingga membuat siklus. (H. B. Sutopo, 1991 : 13)

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan karya ilmiah, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Sistematika memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar penulisan hukum agar memudahkan dalam mempelajari isinya. Penulisan hukum terbagi menjadi empat bab yang saling berhubungan. Setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab yang masing-masing merupakan pembahasan dari bab yang bersangkutan. Adapun sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan mengenai latar belakang masalah yang merupakan hal-hal yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian, perumusan masalah merupakan inti permasalahan yang ingin diteliti, tujuan penelitian berisi tujuan dari penulis dalam mengadakan penelitian, manfaat penelitian merupakan hal-hal yang diambil dari hasil penelitian, metode penelitian berupa jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, selanjutnya adalah sistematika penulisan hukum yang merupakan kerangka atau susunan isi penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori kepustakaan yang melandasi penelitian serta mendukung di dalam memecahkan masalah yang diangkat dalam penulisan hukum ini, yaitu: tinjauan umum tentang pembuktian dan alat bukti serta tinjauan umum tentang alat bukti keterangan saksi.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai kekuatan pembuktian kesaksian yang berdiri sendiri dalam persidangan, serta menguraikan tindakan hakim untuk mengambil putusan terhadap adanya kesaksian yang berdiri sendiri dalam proses persidangan dalam hal ini hakim di Pengadilan Negeri Surakarta.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSATAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian dan Alat Bukti

a) Pengertian Pembuktian

Yang dimaksud dengan pembuktian, adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggung-jawabkannya (Darwan Prinst, 1998: 133).

Subekti (2001: 1) menerangkan bahwa “Membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa”.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan pada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa (M. Yahya harahap, 2002: 273)

Dari uraian singkat di atas arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana, antara lain:

- Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak boleh leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar diluar ketentuan yang telah digariskan undang-undang.

Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang hendak dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Jika tidak demikian maka orang yang benar-benar bersalah dapat lepas dari hukuman dan orang yang tidak bersalah dapat mendapat hukuman.

- Sehubungan dengan pengertian di atas, majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara “limitatif”, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.

b) Prinsip Pembuktian.

Prinsip-prinsip pembuktian antara lain:

(1) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Prinsip ini terdapat pada Pasal 184 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan” atau disebut dengan istilah *notoire feiten*.

Secara garis besar fakta *notoir* dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

(a) Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian.

Yang dimaksud sesuatu misalnya, harga emas lebih mahal dari perak. Dan yang dimaksud dengan peristiwa misalnya, pada tanggal 17 Agustus diadakan peringatan hari kemerdekaan Indonesia.

(b) Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian. Misalnya, arak adalah termasuk minuman keras yang dalam takaran tertentu bisa menyebabkan seseorang mabuk (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003: 20).

2) Menjadi saksi adalah kewajiban

Kewajiban seseorang menjadi saksi diatur pada penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: “Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Demikian pula dengan ahli.”

3) Satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*)

Prinsip ini terdapat pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: *“Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”*.

Menurut KUHAP, *keterangan satu saksi bukan saksi* tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat. Hal ini dapat disimpulkan dari penjelasan Pasal 184 KUHAP sebagai berikut: *“Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah”*.

Jadi, ini berarti satu saksi, satu keterangan ahli, satu surat, satu petunjuk, atau keterangan terdakwa disertai keyakinan hakim cukup sebagai alat bukti untuk memidana terdakwa dalam perkara cepat (M. Yahya Harahap, 2002: 267).

- (4) Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa

Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan prinsip *“pembuktian terbalik”* yang tidak dikenal oleh hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

Menurut Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi: *“Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain”*.

- (5) Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri.

Prinsip ini diatur pada Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang berbunyi: *“Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”*.

Ini berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa sendiri (Adnan Paslyadja, 1997: 8-15).

Menurut asas ini, apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang berkedudukan sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Jika dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap terdakwa B, demikian sebaliknya (M. Yahya Harahap, 2003: 321).

c) Sistem Pembuktian.

Untuk membuktikan kesalahan terdakwa dipengadilan, maka harus dilakukan dengan cara atau ketentuan-ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pembuktian sah harus dilakukan dalam sidang pengadilan yang memeriksa terdakwa, dengan kata lain bahwa pembuktian yang dilakukan diluar sidang pengadilan maka dianggap tidak sah. Hal ini diharapkan agar dapat memperoleh kebenaran secara hukum, karena kebenaran mutlak sukar ditemukan.

Kebenaran dalam perkara pidana merupakan kebenaran yang disusun dan didapatkan dari jejak, kesan dan refleksi dari keadaan dan atau benda yang berdasarkan ilmu pengetahuan dapat berkaitan dengan masa lalu yang diduga menjadi perbuatan pidana. Suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang masa lalu tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan perkara pidana dalam sistem pembuktian

dikenal berbagai macam sistem. Menurut Prof. DR. Andi Hamzah, S.H. ada empat macam sistem pembuktian yaitu (Andi Hamzah, 2002: 247-251) :

- a. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*)

Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan pada undang-undang *melulu*. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini juga disebut sistem pembuktian formal (*formeel bewijstheorie*).

Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras.

- b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim *melulu* (*conviction intime*)

Sistem ini memberi kebebasan pada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasehat hukumnya sulit melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memberikan pidana atau hukuman terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan.

Pelaksanaan pembuktian seperti pemeriksaan dan pengambilan sumpah saksi, pembacaan berkas perkara terdapat pada semua perundang-undangan acara pidana, termasuk sistem keyakinan hakim *melulu*..

- c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan atas keyakinan hakim atas alasan yang logis (*la conviction raisonnee*)

Dalam sistem ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah atau tidak berdasarkan keyakinannya, yaitu keyakinan yang didasarkan pada dasar-dasar pembuktian disertai dengan kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan pada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem atau teori ini juga dapat dikatakan pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrijebewijstheorie*).

d. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*)

HIR maupun KUHAP semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (*negatief wettelijk*). Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP yang menyatakan :

“ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Dari kalimat tersebut di atas nyata bahwa pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk*).

Wettelijk, artinya bahwa macam-macamnya alat bukti sudah ditentukan oleh undang-undang.

Negatief artinya bahwa untuk menyatakan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa dibutuhkan suatu keyakinan atas alat-alat bukti yang ada. Tanpa adanya keyakinan terhadap alat bukti yang diajukan dalam persidangan maka terdakwa diputus bebas (Hari Sasangka, Lily Rosita, 2003: 223).

Dalam penjelasan Pasal 183 KUHAP, dimana syarat pembuktian menurut cara dan alat bukti yang sah, lebih ditekankan pada perumusan yang tertera dalam undang-undang, seseorang untuk dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhkan pidanya kepadanya, apabila :

- 1) kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti”
- 2) dan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim akan “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Jika dilihat melalui konstruksi hukumnya maka keyakinan hakim hanyalah sebagai pelengkap. Tidak dibenarkan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang kesalahannya tidak terbukti secara sah berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku, kemudian keterbuktiannya itu digabung dan didukung dengan keyakinan hakim. Dalam praktek keyakinan hakim itu bisa saja dikesampingkan apabila keyakinan hakim tersebut tidak dilandasi oleh suatu pembuktian yang cukup. Keyakinan hakim tersebut dianggap tidak mempunyai nilai apabila tidak dibarengi oleh pembuktian yang cukup.

Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif ini, pemidanaan didasarkan pada yang berganda, yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim. Dan menurut undang-undang keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan perundang-undangan.

Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif sebaiknya tetap dipertahankan, karena:

- memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, jangan samapai hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.
- Berfaedah jika ada aturan yang mengikat bagi hakim dalam menyusun keyakinanya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam mengambil putusan.

Pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam pembuktian harus dilakukan dengan sangat teliti, karena dengan alat bukti ini lebih mudah mengungkap peristiwanya. Karena itu hakim harus dapat membaca keadaan saksi pada saat memberikan keterangan.

Sehubungan dengan pembahasan sistem pembuktian, ada lagi prinsip yang perlu dibicarakan yaitu masalah “batas minimum pembuktian”.

Asas minimum pembuktian merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi untuk membuktikan kesalahan terdakwa, dengan kata lain bahwa asas minimum pembuktian adalah suatu prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti membuktikan salah atau tidaknya terdakwa (M. Yahya Harahap, 2002: 283).

Untuk lebih jelasnya mengenai batas minimum pembuktian kita bertolak pada bunyi Pasal 183 KUHAP yaitu “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya”. Dalam Pasal tersebut terdapat kalimat “sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah”, maksudnya adalah bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa baru boleh dilakukan hakim apabila kesalahan terdakwa telah dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Jadi “minimum pembuktian” yang dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa agar kepadanya dapat dijatuhkan pidana, harus sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Satu alat bukti saja, undang-undang menganggap tidak atau belum cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Batas minimum yang dianggap cukup oleh undang-undang, paling sedikit “dua alat bukti yang sah”.

d) Alat Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Hukum Acara Pidana

Dalam membantu pembuktian suatu tindak pidana, hakim akan dibantu dengan alat bukti yang ada. Dimana mengenai alat bukti ini telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hakim dengan sungguh-sungguh harus memeriksa alat-alat bukti yang telah diajukan

oleh penuntut umum guna mendapatkan kebenaran guna mendapatkan kebenaran sesuai dengan keyakinannya.

Alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat bukti yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, guna menambah keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Adapun alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Dari urutan penyebutan alat-alat bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perkara pidana yang terutama suatu tindak pidana dibuktikan dengan alat bukti keterangan saksi. Karena dalam melakukan suatu tindak pidana, seseorang akan berusaha menghilangkan jejaknya.

Disini akan kami uraikan mengenai alat-alat bukti yang sah yang telah diatur dalam KUHAP.

Ad. 1. Keterangan saksi.

Pengertian keterangan saksi terdapat pada Pasal 1 angka 27 KUHAP disebutkan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu

peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Jadi Saksi dalam proses pidana adalah saksi yang mendengar, mengalami atau melihat sendiri suatu peristiwa, bukan saksi yang memperoleh keterangan dari orang lain atau *testimonium de auditu*. Satu saksi bukan saksi didalam KUHAP diatur dalam Pasal 185 ayat (2), (3), dan (4). berdasarkan Pasal tersebut maka dalam membuktikan kesalahan terdakwa seorang saksi saja tidak cukup. Terhadap keterangan saksi ini maka hakim dalam menilai kebenarannya dengan menyesuaikan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, keterangan saksi dengan alat bukti yang ada, alasan saksi memberikan kesaksian, serta cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi keterangan yang diberikan oleh saksi.

Ad. 2. Keterangan Ahli.

Dalam KUHAP keterangan ahli diatur dalam Pasal 186 yang menyatakan :

“ Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan ”

Dalam penjelasan Pasal 186 KUHAP menentukan bahwa keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang

dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

Pasal 1 angka 28 disebutkan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, tetapi sulit pula dibedakan secara tegas. Kadang-kadang seorang ahli merangkap sebagai seorang saksi. Namun isi dari keterangan ahli dan keterangan saksi itu berbeda. Keterangan saksi adalah mengenai apa yang dialami oleh saksi itu sendiri. Sedangkan keterangan ahli adalah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal tersebut (Andi Hamzah, 2002: 269).

Ad. 3. Surat

Pasal 187 mengatakan surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri
- surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya
- surat keterangan dari seorang ahli yang membuat pendapat berdasarkan keahliannya
- surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Ad. 4. Petunjuk

Diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang menyatakan : “ *petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri,*

menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya” Dalam ayat selanjutnya disebutkan bahwa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa.

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti. Pada akhirnya persoalan diserahkan pada hakim, dengan demikian menjadi sama dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti.

Salah satu contoh sesuatu yang dapat dijadikan sebagai suatu petunjuk adalah seorang saksi yang memberikan keterangan tanpa disumpah, maka keterangan saksi tersebut merupakan suatu petunjuk.

Ad. 5. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 189 KUHAP yang menyatakan : “ *Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan dalam sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri*”

Dalam Pasal 1 butir 15 terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan di adili di sidang pengadilan. Sedangkan keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di depan sidang pengadilan tentang perbuatan yang telah ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

2. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti Keterangan Saksi

a) Dasar Hukum Alat Bukti Keterangan Saksi

- 1) Pemeriksaan Saksi
Pasal 159 sampai 174 KUHAP
- 2) Keterangan Saksi
Pasal 184 ayat (1) huruf a dan Pasal 185 KUHAP

b) Pengertian Saksi Dan Alat Bukti Keterangan Saksi

Dalam pembuktian untuk mendapatkan kebenaran mengenai telah terjadinya tindak pidana, hakim dengan alat bukti yang ada dapat

menemukan keyakinanya akan diri terdakwa. Salah satu bukti tersebut adalah keterangan saksi yang akan memberikan pengetahuannya tentang hal yang terkait dengan tindak pidana yaitu memberikan keterangan saksi.

Pengertian saksi dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Sedangkan pengertian saksi dalam kamus hukum adalah orang yang terlibat (dianggap) mengetahui terjadinya tindak pidana, kejahatan atau suatu peristiwa. (Yan Pramudya Puspa, 1977: 746)

Syarat menjadi seorang saksi (Imam Soetikno dan Robby Khrimawahana, 1988: 78) adalah:

1. Dewasa, telah berumur 15 tahun atau pernah kawin.
2. Sehat akal.
3. Tidak ada hubungan keluarga, pertalian darah atau perkawinan dengan terdakwa.

Pengertian keterangan saksi menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

c) Syarat Sahnya Alat Bukti Keterangan Saksi

Salah satu kewajiban yang harus dijalani seorang saksi harus memberikan keterangan yang sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa menurut apa yang di dengar, di lihat dan dialami sendiri oleh saksi.

Keterangan saksi supaya dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah harus memenuhi dua syarat (Darwan prinst, 1998: 35), yaitu:

1. Syarat *formil*, yaitu bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila diberikan dibawah sumpah. Keterangan saksi yang tidak dibawah sumpah hanya boleh dipergunakan sebagai penambah penyaksian yang sah.

2. Syarat *materiil*, yaitu bahwa keterangan seorang saksi tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (*Unus Testis Nulus Testis*). Akan tetapi keterangan seorang saksi adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.

Berkaitan dengan syarat formil keterangan saksi yang menghendaki disumpahnya saksi sebelum memberikan keterangan , maka hal ini sesuai dengan Pasal 160 ayat (3) KUHAP, bahwa sebelum didengar keterangannya saksi harus disumpah terlebih dahulu menurut cara yang ditetapkan oleh agamanya masing-masing, apabila mereka akan memberikan keterangan yang mengandung kebenaran yang tidak lain dari pada kebenarannya. Penyumpahan semacam ini dinamakan *promissoris*, cara lain adalah yang dinamakan secara *accertoris*, yaitu saksi yang didengar dulu keterangannya, kemudian baru disumpah.

Selanjutnya dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan menolak untuk bersumpah atau berjanji, maka pemeriksaanya tetap dilakukan sedangkan ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di Rumah Tahanan Negara paling lama 14 hari.

Dengan syarat materiil ditentukan keterangan seorang saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat bukti. Jika terdakwa tidak mengakui kesalahannya dan hanya seorang saksi saja yang memberatkan terdakwa, sedang alat bukti yang lain tidak ada, maka Pengadilan Negeri tidak boleh menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa. Apabila berbagai keterangan dari beberapa saksi yang masing-masing melakukan menyaksikan suatu peristiwa, akan tetapi ada hubungan antara peristiwa itu maka keterangan saksi dapat digabungkan untuk menambah keyakinan bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi.

Dengan demikian bahwa keterangan seorang saksi yang berdiri sendiri dimana antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain tidak berhubungan sehingga tidak dapat menyimpulkan adanya suatu peristiwa atau keadaan, maka kesaksian semacam ini memang tidak dapat memberikan kekuatan pembuktian yang sah. Tetapi apabila keterangan tersebut dapat berhubungan sehingga dapat menyimpulkan adanya suatu peristiwa atau keadaan maka kesaksian semacam ini merupakan alat bukti yang sah, maka ia tetap mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti keterangan saksi.

Pengaturan lebih lanjut mengenai keterangan saksi sebagai pembuktian dapat dilihat seperti yang tercantum dalam Pasal 185 KUHAP, sebagai berikut:

1. keterangan saksi sebagai alat bukti, ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;
2. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang di dakwakan kepadanya;
3. Keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;
4. Keterangan beberapa saksi yang berdiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;
5. Baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi;
6. Dalam menilai kebenaran seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
 - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
 - d. cara hidup dan kesusilaan saksi atau segala sesuatu pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
7. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya.

d) Cara Menilai kebenaran Keterangan Saksi

untuk menilai beberapa saksi sebagai alat bukti yang sah, harus terdapat saling berhubungan antara keterangan-keterangan tersebut, sehingga dapat membentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Namun dalam menilai kebenaran keterangan para

saksi Pasal 185 ayat (6) KUHAP menuntut kewaspadaan hakim, untuk sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan saksi

Saling persesuaian harus jelas tampak penjabarannya dalam pertimbangan hakim, sedemikian rupa jelasnya diuraikan secara terperinci dan sistematis. Jangan sampai penguraian analisis persesuaian itu hanya diuraikan secara mengambang dan diskriptif. Malah kadang-kadang analisis persesuaian itu hanya tertuang dalam ungkapan atau kesimpulan singkat yang berbunyi: keterangan para saksi telah memperlihatkan persesuaian, oleh karena itu kesalahan terdakwa telah terbukti. Dan apabila dicari persesuaian itu dalam pertimbangan, tidak dijumpai.

2. Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain.

Dalam hal ini, jika diajukan Penuntut Umum dalam persidangan pengadilan terdiri dari saksi dengan alat bukti lain, baik berupa keterangan ahli, surat atau petunjuk, hakim dalam sidang maupun dalam pertimbangannya harus meneliti dengan sungguh-sungguh saling persesuaian maupun pertentangan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain tersebut.

3. Alasan saksi memberi keterangan tertentu.

Dalam hal ini, hakim harus mencari alasan mengapa saksi memberi keterangan yang seperti itu. Tanpa mengetahui alasan saksi yang pasti, akan memberikan gambaran yang kabur bagi hakim tentang keadaan yang diterangkan saksi. Misalnya saksi menerangkan, bahwa ia tidak begitu pasti apakah memang benar-benar terdakwa yang ia lihat pada saat peristiwa pidana terjadi. Akan tetapi, baik dari raut muka, tinggi badan serta rambutnya, sangat bersesuaian betul dengan terdakwa. Dalam contoh ini, saksi memberikan keterangan dengan suatu keadaan yang kurang pasti. Tentu ada sebab dan alasannya mengapa saksi memberikan keterangan tentang keadaan diri terdakwa yang tidak pasti. Untuk itu hakim berperan menggali. Mungkin alasan saksi benar-benar mempunyai dasar alasan yang dapat diterima akal. Misalnya, sebabnya saksi tidak berani memastikan terdakwalah yang dilihatnya sebagai pelaku tindak pidana, karena kejadian itu terjadi pada waktu malam, sehingga yang dapat dilihatnya hanya ciri-ciri pelaku saja. Atau karena memang sudah lama penglihatan saksi agak kabur, yang menyebabkan dia tidak dapat mengenal dengan pasti pelaku tindak pidana.

e) Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi

Mengenai nilai kekuatan pembuktian saksi, kita melihat kembali

masalah yang berhubungan dengan keterangan saksi ditinjau dari sah

atau tidaknya keterangan saksi sebagai alat bukti. Ditinjau dari segi ini,

keterangan saksi yang diberikan dalam sidang pengadilan, dapat dikelompokkan menjadi dua jenis (M. Yahya Harahap, 2002: 291-295) yaitu:

1) Keterangan yang diberikan “tanpa sumpah”.

Mengenai keterangan saksi yang tidak disumpah bisa terjadi:

(a) Karena saksi menolak disumpah,

Tentang penolakan saksi bersumpah telah diatur dalam Pasal 161 KUHAP. Sekalipun penolakan itu tanpa alasan yang sah dan walaupun saksi telah disandera, namun saksi tetap menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji. Dalam keadaan seperti itu menurut Pasal 161 ayat (2) KUHAP, nilai keterangan saksi yang demikian “dapat menguatkan keyakinan hakim”.

(b) Keterangan yang diberikan tanpa sumpah

Hal ini bisa terjadi seperti yang diatur dalam Pasal 161 KUHAP, yaitu saksi yang telah memberikan keterangan dalam pemeriksaan penyidikan dengan tidak disumpah, ternyata “tidak dapat di hadirkan” dalam sidang pengadilan. Keterangan saksi yang terdapat dalam berita acara penyidikan dibacakan di sidang pengadilan (kesaksian yang dibacakan), dalam hal ini undang-undang tidak menyebut secara tegas nilai pembuktian

yang dapat ditarik dari keterangan saksi yang dibacakan disidang pengadilan.

Namun demikian, jika bertitik tolak dari ketentuan Pasal 161 ayat (2) KUHAP dihubungkan dengan Pasal 185 ayat (7) KUHAP, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi yang dibacakan di sidang pengadilan, sekurang-kurangnya dapat dipersamakan dengan keterangan saksi yang diberikan di sidang pengadilan tanpa sumpah. Jadi sifatnya tetap tidak merupakan alat bukti, tetapi nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada kesaksian yang dibacakan di sidang pengadilan adalah:

- i) dapat dipergunakan untuk “menguatkan keyakinan hakim,
- ii) atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai “tambahan alat bukti” yang sah lainnya, sepanjang keterangan saksi yang dibacakan mempunyai hubungan “saling bersesuaian” dengan alat bukti yang sah tersebut dan alat bukti yang telah ada telah memenuhi batas minimum pembuktian

(c) Karena hubungan kekeluargaan,

Seorang saksi yang mempunyai pertalian keluarga tertentu (Pasal 168 KUHAP) dengan terdakwa tidak dapat memberikan keterangan dengan sumpah. Kecuali mereka menghendakinya dan disetujui secara tegas oleh penuntut umum dan terdakwa.

Apabila penuntut umum atau terdakwa tidak menyetujui mereka sebagai saksi dengan disumpah, maka dalam Pasal 169 ayat (2) KUHAP memberi kemungkinan bagi mereka untuk diperbolehkan memberi keterangan “tanpa sumpah”. Tetapi disini undang-undang tidak menyebut secara tegas nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan seperti ini.

Untuk mengetahui nilai keterangan mereka yang tergolong dalam Pasal 168 KUHAP, harus kembali melihat Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 185 ayat (7) KUHAP:

- i) Keterangan mereka tidak dapat dinilai sebagai alat bukti,
- ii) tetapi dapat dipergunakan menguatkan keyakinan hakim,
- iii) atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan menguatkan alat bukti yang sah lainnya sepanjang keterangan tersebut mempunyai persesuaian dengan alat bukti yang sah lainnya itu, dan alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian.

(d) Saksi termasuk golongan yang disebut Pasal 171 KUHAP.

Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin atau orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang baik kembali, boleh diperiksa memberi keterangan “tanpa sumpah”, disidang pengadilan.

Kekuatan pembuktian keterangan mereka dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah. Tetapi, sekalipun keterangan itu tidak merupakan alat bukti yang sah, dalam penjelasan Pasal 171 KUHAP telah menentukan kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan itu, “dapat” dipakai sebagai sebagai “petunjuk”.

Setelah melihat beberapa faktor penyebab seorang saksi memberi keterangan tanpa sumpah, maka dapat disimpulkan sifat dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan tersebut. Titik tolak untuk mengambil kesimpulan umum dalam hal ini adalah Pasal 185 ayat (7) KUHAP tanpa mengurangi ketentuan lain yang diatur dalam Pasal 161 ayat (2) KUHAP, maupun Pasal 169 ayat (2) dan penjelasan Pasal 171 KUHAP. Bertitik tolak pada ketentuan-ketentuan tersebut, secara umum dapat kita simpulkan:

(1) Semua keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah dinilai “bukan merupakan alat bukti yang sah”. Walaupun keterangan yang diberikan tanpa sumpah itu saling bersesuaian dengan yang lain, sifatnya tetap “bukan merupakan alat bukti”.

(2) Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian,

Setiap keterangan tanpa sumpah, pada umumnya “tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian”. Sifatnya saja pun

bukan alat bukti yang sah, dengan sendirinya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

(3) Akan tetapi, “dapat” dipergunakan sebagai “tambahan” alat bukti yang sah. Sekalipun keterangan tanpa sumpah bukan merupakan alat bukti yang sah, dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian, pada umumnya keterangan itu “dapat” digunakan “sebagai tambahan” menyempurnakan kekuatan pembuktian alat bukti yang sah:

- dapat “menguatkan keyakinan hakim” seperti yang disebut pada Pasal 162 ayat (2) KUHAP,
- dapat dipakai “sebagai petunjuk” seperti yang disebut dalam penjelasan Pasal 171 KUHAP.

2) Keterangan saksi yang disumpah.

Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi agar dapat menjadi alat bukti yang sah, bukan hanya tergantung pada unsur sumpah ini saja, tetapi harus didukung dengan syarat-syarat lain yang ditentukan undang-undang, yaitu:

- (a) Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya,
- (b) Keterangan yang diberikan harus mengenai peristiwa pidana yang saksi dengar, lihat dan alami sendiri dengan menyebut secara jelas sumber pengetahuannya,
- (c) Keterangan saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan,

- (d) Keterangan seorang saksi saja bukan merupakan alat bukti yang sah, oleh karena itu harus dipenuhi batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

Apabila syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, maka keterangan saksi mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Kekuatan pembuktian keterangan saksi adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai kekuatan pembuktian bebas.

Jadi dalam alat bukti kesaksian tidak melekat sifat pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*), dan juga tidak melekat didalamnya sifat kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan (*beslissende bewijskracht*). Tegasnya bahwa alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai kekuatan pembuktian “bebas”.

- b. Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim.

Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak menentukan, sama sekali tidak mengikat hakim. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi, hakim bebas menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat pada keterangan itu, dan “dapat menerima” atau menyingkirkannya”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kekuatan pembuktian dari keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah sebagai berikut :

- Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hakim mempunyai kebebasan untuk menilainya,
- Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bebas, dapat dilumpuhkan terdakwa dengan alat bukti yang lain berupa saksi *a decharge* maupun dengan keterangan ahli atau alibi.

f) Kewajiban Saksi

Seorang saksi tidak hanya memiliki hak-hak saja, namun juga terdapat beberapa kewajiban seperti yang diatur dalam Pasal 159 ayat (2), 161 dan 174 KUHAP sebagai berikut:

1. Pasal 159 ayat (2): "Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan".
2. Pasal 161 ayat (1): "Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dan (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat Rumah Tahanan Negara paling lama empat belas hari".
3. Pasal 174 ayat (2): "Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan jaksa penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu".

Kewajiban yang melekat pada seorang saksi (Djoko Prakoso, 1988: 128) adalah:

- (a) Kewajiban untuk menghadap di persidangan
- (b) Kewajiban bersumpah
- (c) Kewajiban memberikan keterangan

Seperti penjelasan pada Pasal 159 ayat (2) KUHAP bahwa setiap orang wajib menjadi saksi, namun terdapat beberapa pengecualian yang menyebabkan seseorang tidak dapat menjadi saksi. Pengecualian ini antara lain (Djoko Prakoso, 1988: 49):

1. Mereka yang relatif tidak berwenang memberi kesaksian.

Pada Pasal 168 KUHAP dinyatakan kekecualian ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengarkan keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, yaitu:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

2. Mereka yang absolut tidak berwenang memberi kesaksian.

Dalam Pasal 171 KUHAP menyatakan sebagai berikut: Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah:

- a. anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

3. Orang-orang yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya dapat dibebaskan dari kewajiban untuk memberi kesaksian.

Hal ini sesuai dengan Pasal 170 KUHAP yang menyatakan :

- 1. Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
- 2. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

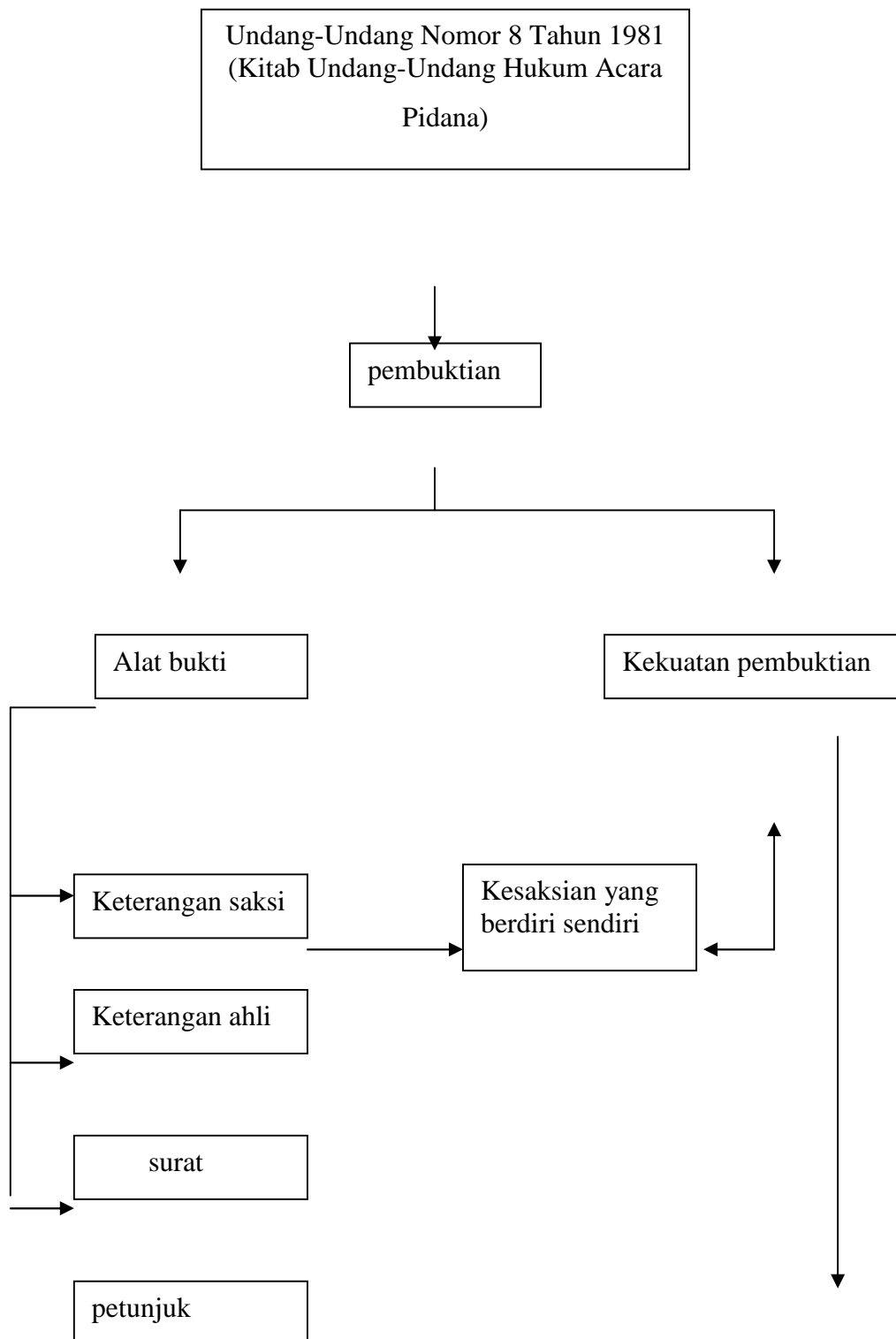
Dalam Pasal tersebut tidak dijelaskan secara tegas mengenai jabatan dan pekerjaan apa saja yang dimaksud, dan belum ada ketentuan mengenai hal tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Maka dalam hal ini hakimlah yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapat kebebasan tersebut.

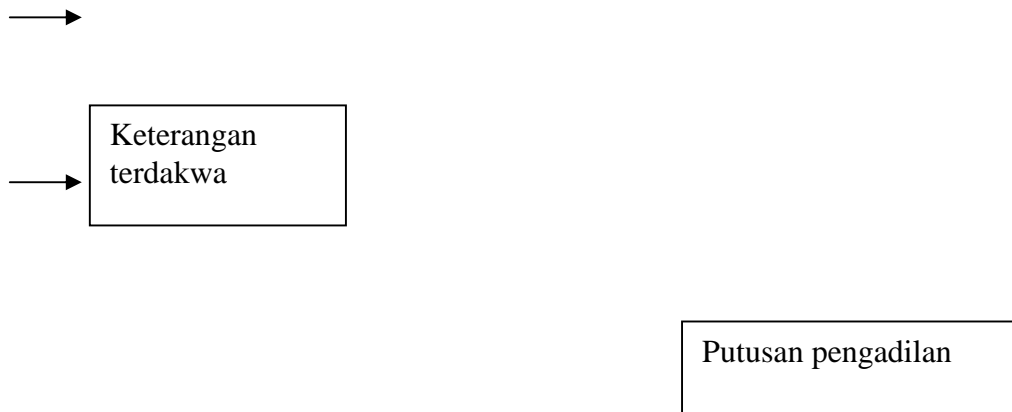
g) Jenis-jenis Saksi

Menurut sifatnya saksi dapat dibedakan menjadi dua (Darwan Prinst, 1998 ; 139), yaitu:

1. Saksi *A Charge (memberatkan terdakwa)* adalah saksi dalam perkara pidana yang dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, dikarenakan kesaksiannya yang memberatkan terdakwa. Dalam hal saksi yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara atau yang diminta oleh terdakwa atau penasehat hukum atau penuntut umum, selama berlangsungnya sidang atau belum dijatuhkan putusan, hakim ketua sidang wajib mendengarkan kesaksian tersebut. (Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP.
2. Saksi *A De Charge (Menguntungkan terdakwa)* adalah saksi yang dipilih atau diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum, yang sifatnya menguntungkan terdakwa.

2. Kerangka pemikiran





(**Gambar 2** : Bagan Alur Kerangka Pemikiran)

Keterangan:

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan meliputi beberapa proses dan salah satunya adalah pembuktian, pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan dalam sidang pengadilan, karena dengan pembuktian ini akan menentukan nasib terdakwa apakah dia bersalah atau tidak.

Dalam proses pembuktian ini tentunya tidak terlepas dengan jenis-jenis alat bukti apa saja yang sah digunakan dalam pembuktian di sidang pengadilan dan bagaimana nilai kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti tersebut.. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, jenis alat bukti yang sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti adalah :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Disini kami akan membahas mengenai alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah dalam proses pembuktian di sidang pengadilan. Agar

keterangan saksi dapat menjadi alat bukti yang sah terdapat dalam Pasal 185 ayat (4) KUHAP, dinyatakan bahwa keterangan para saksi yang dihadirkan dalam sidang pengadilan mempunyai saling hubungan atau keterkaitan serta saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu. Tapi bagaimana apabila keterangan dari beberapa saksi yang dihadirkan di sidang pengadilan saling “berdiri-sendiri”, maksudnya adalah bahwa keterangan antara saksi yang satu dengan saksi yang lain di sidang pengadilan tidak terdapat kesesuaian atau tidak ada keterkaitan atau hubungan yang dapat mewujudkan suatu kebenaran akan adanya kejadian atau keadaan tertentu. Lalu bagaimana kekuatan pembuktian dari kesaksian yang berdiri-sendiri tersebut dan bagaimana pula pengaruhnya terhadap putusan pengadilan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Yang Berdiri Sendiri dalam Proses Persidangan

1. Duduk Perkara

Paparan kasus perkara Penganiayaan di Pengadilan Negeri Sumber Nomor: 54/Pid.S/1982/PN.Sbr:

- a. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor: 54/Pid.S/1982/PN.Sbr.

Bahwa ia terdakwa SUPANDI alias WARDI bin DELAP pada hari Rabu tanggal 9 juni 1982 lebih kurang jam 23.00 WIB, peristiwa terjadi di jalan Raya jurusan Cirebon-Tegal termasuk desa Kalipasung,

Kecamatan Babakan, kabupaten Cirebon atau setidaknya tidaknya di salah satu tempat masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Cirebon di Sumber telah melakukan penganiayaan kepada TONI bin IBRAHIM yakni ketika itu TONI bin IBRAHIM sedang mengendarai sepeda motor dan tepat pada tempat seperti tersebut di atas telah menyerempet adik perempuan ia Terdakwa bernama KERI yang sedang mengendarai sepeda, yang mana baik TONI bin IBRAHIM maupun KERI telah menderita luka-luka akibat serempetan itu; mendengar terjadinya yang dialami adiknya KERI, lalu ia Terdakwa telah mendatangi ke tempat terjadinya peristiwa itu dan disana melihat adiknya tergeletak dalam keadaan tidak sadar karena luka-luka, sedangkan si penabrak (TONI bin IBRAHIM) duduk dipinggir jalan dalam keadaan luka berat memegang kepala bagian belakang; melihat keadaan adiknya (KERI) luka-luka, kemudian ia Terdakwa timbul emosi, kalap lalu telah memukul dengan tangan kepada TONI bin IBRAHIM pada arah bagian mukanya sebanyak satu kali atau setidaknya tidaknya pemukulan itu dilakukan dengan benda keras, sehingga sebagai akibat pemukulan TONI bin IBRAHIM luka-lukanya bertambah berat dan setelah mendapat perawatan di RSUD Gunung Jati Cirebon tidak berapa lama kemudian telah meninggal dunia, sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Gunung Jati Cirebon tanggal 15 Juni 1982 No. 2006 RRS. 032.2/1982/Pro Yustisia yang ditandatangani oleh dr. WARIADI SANTOSO, bahwa luka-lukanya korban oleh terkena benda tajam dan tumpul.

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan uraian kasus posisi di atas maka terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 351 ayat (1) (2) dan (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang.

c. Putusan dan Pertimbangan Hukumnya.

Menimbang, bahwa atas dasar dakwaan tersebut pengadilan akan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan para saksi dibawah sumpah yaitu :

1. ROSIDI bin ABUBAKAR;
2. RASIM bin DRA'I;
3. SARIP bin GURINDA;
4. ABDUL LATIP bin NURHALIM;
5. RATMADJA bin H. TOHIR;
6. SAMINTA bin TASIM;
7. DIDI IMAN SETIADI bin NAHROWI;
8. MUKHIDIN bin DARJA;
9. SAKTENI bin CARSA;
10. ABIDIN bin SAWUL;
11. TAPSIR bin H. SAKAM;

dan hanya didengar keteranganya saja Ny. KERI;

Keterangan para saksi mana yang bersangkutan paut dengan perkara ini akan diuraikan dibawah ini:

1. ROSIDI bin ABUBAKAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada hari rabu 9 juni 1982 kira-kira jam 23.00 WIB ketika sampai di Desa Kali pasung di jalan Raya Jurusan Cirebon – Tegal melihat banyak masyarakat berkerumun di jalan Raya;
 - Bahwa lalu Saksi melihat kerumunan orang tersebut dan disitu ada yang memberitahu ada kecelakaan dan yang mendapat kecelakaan nama TONI;
 - Bahwa kemudian Saksi turun dari motornya dan melihat TONI menggeletak di pinggir jalan berikut motor dan seorang anak perempuan berikut sepedanya;

- Bahwa Saksi melihat TONI masih belum sadarkan diri karena luka berat dibagian kepalanya keluar darah;
 - Bahwa selanjutnya ketika Saksi akan menolong TONI tiba-tiba datang WARDI langsung menginjak kaki TONI dan kemudian setelah TONI duduk dipukul dengan tangan oleh WARDI di bagian mukanya sebanyak satu kali;
 - Bahwa Saksi melihat WARDI mengambil pentung kayu lalu memukul motor TONI;
 - Bahwa kemudian Saksi melapor kepada pamong Desa Bendungan dan sewaktu TONI diangkut ke Rumah Sakit Gunung Jati, Saksi tidak tau;
2. RASIM bin DRA'I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mendengar laporan dari SARIP yang menerangkan bahwa TONI mendapat kecelakaan di jalan Raya depan Balai Desa Kalipasung;
 - Bahwa atas laporan tersebut lalu Saksi datang dan melihat ke tempat kecelakaan dan sudah banyak orang berkerumun;
 - Bahwa Saksi melihat Toni tergeletak tidak sadar dalam keadaan luka di bagian kepala dan juga seorang perempuan tergeletak pula dan tidak sadar;
 - Bahwa Saksi melihat waktu TONI dan anak perempuan diangkut mobil Colt ke Rumah Sakit;
 - Bahwa pada hari itu juga sekitar jam 01.30 malam TONI meninggal dunia di Rumah Sakit Gunung Jati;
3. SARIP bin GURINDA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebagai pengemudi sepeda motor pinjaman dan tidak punya SIM;

- Bahwa Saksi mengalami kecelakaan di jalan Raya Tegal – Cirebon di Kalipasung karena sekonyong-konyong dipotong sepeda;
 - Bahwa Saksi melihat TONI tergeletak dan ketika akan menolong datang masyarakat akan mengeroyok lalu Saksi lari;
4. ABDUL LATIP bin NURHALIM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerima laporan dari ROSIDI yang menerangkan bahwa TONI mendapat kecelakaan lalu lintas di jalan Raya Kalipasung;
 - Bahwa atas laporan tersebut maka Saksi memerintahkan RATMADJA untuk pergi mengecek ke tempat kejadian;
 - Bahwa tentang kejadiananya Saksi tidak tau;
5. SAMINTA bin TASIM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melihat di jalan Raya di Desa Kalipasung jurusan Cirebon – Tegal ada kecelakaan lalu-lintas;
 - Bahwa Saksi melihat KERI dan seorang laki-laki tergeletak di pinggir jalan dalam keadaan tidak sadar;
 - Bahwa Saksi menyingkirkan masyarakat supaya jangan dekat-dekat, tetapi tiba-tiba datang WARDI (Terdakwa) dalam keadaan emosi mau memukul laki-laki yang dalam keadaan tidak sadar tersebut. Lalu Saksi cegah dan ditarik sehingga tidak terjadi apa-apa;
 - Bahwa Saksi memerintahkan WARDI supaya mencari kendaraan dan setelah dapat lalu para korban diangkut ke Rumah Sakit Gunung Jati;
 - Bahwa keesokan harinya Saksi mendengar laki-laki yang mendapat kecelakaan yang ternyata bernama TONI meninggal dunia di Rumah Sakit Gunung Jati.

6. DIDI IMAN SETIADI bin NAHROWI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat kecelakaan lalu-lintas di jalan raya di Desa Kalipasung;
- Bahwa Saksi melihat seorang anak perempuan dan seorang laki-laki menggeletak berikut sepeda dan sepeda motor;
- Bahwa kemudian Saksi melihat WARDI kakak KERI (korban wanita) emosi dan setelah melihat adiknya tergeletak lalu WARDI menghampiri korban laki-laki (TONI) akan memukul, akan tetapi terus dicegah bersama-sama dengan Saksi SAMINTA sehingga tidak terjadi pemukulan;
- Bahwa Saksi tau WARDI mencari kendaraan dan setelah dapat lalu mengangkut kedua korban ke Rumah Sakit Gunung Jati;
- Bahwa keesokan harinya Saksi mendengar TONI meninggal di Rumah Sakit Gunung Jati.

7. MUKHIDIN bin DARJA, SAKTENI bin CARSA, ABIDIN bin SAWUL, TAPSIR bin H. SAKAM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu-lintas di jalan raya Cirebon – Tegal di Desa Kalipasung antar sepeda dan sepeda motor;
- Bahwa atas kecelakaan tersebut Saksi melihat dua korban satu laki-laki, dan satu perempuan tergeletak di pinggir jalan tidak sadarkan diri;
- Bahwa para Saksi tidak melihat WARDI melakukan pemukulan terhadap korban laki-laki bernama TONI;

Saksi yang tidak disumpah dan hanya didengar keterangannya saja yaitu Ny. KERI binti DELAP, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi adalah pengendara sepeda;

- Bahwa benar Saksi akan melihat keramaian di SD di Desa Kalipasung;
- Bahwa tau-tau di jalan Raya Saksi ketabrak motor dan setelah itu Saksi tidak tau karena pingsan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan terkecuali keterangan Saksi ROSIDI bin ABUBAKAR Terdakwa menyangkal melakukan pemukulan terhadap TONI.

Menimbang, selanjutnya di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum No. 2001/KS.032.2/ 1982/Pro Yustisia, tertanggal 15 Juni 1982 dikeluarkan Rumah Sakit Gunung Jati yang di tandatangani dr. WIRIADI SANTOSO, dan telah diterangkan tentang isinya.

Menimbang, bahwa kemudian di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 1982 kira-kira jam 23.00 WIB Terdakwa telah dibangunkan oleh orang tuanya bahwa adiknya KERI telah meninggal dunia karena tertabrak motor di jalan Raya Cirebon – Tegal di Desa Kalipasung;
- Bahwa Terdakwa lalu pergi ke tempat kejadian dan di situ melihat KERI adiknya tergeletak di pinggir jalan depan warung dalam keadaan tidak sadar. Sepeda rusak dan selain itu Terdakwa melihat seorang laki-laki katanya pengendara motor sedang duduk di pinggir jalan dalam keadaan luka berat di bagian belakang kepala dan duduk sambil memegangi lukanya;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat KERI adiknya tidak sadar dan diperkirakan mati, lalu Terdakwa emosi yang maksudnya mau memukul korban laki-laki yang kemudian Terdakwa tau namanya TONI;

- Bahwa niat Terdakwa untuk memukul TONI tidak terlaksana karena dihalang-halangi DIDI, IMAN SETIADI dan SAMINTA;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa disuruh Saksi SAMINTA untuk mencari kendaraan dan setelah dapat, lalu kedua korban dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa Terdakwa menunggu adiknya KERI dan pada malam hari Terdakwa mendengar TONI meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan keadaan yang diterangkan Terdakwa beserta adanya bukti surat maka Hakim wajib mempertimbangkan tentang hal ihwal perbuatan Terdakwa, apakah perbuatan tersebut terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dalam surat dakwaan di atas, di mana Penuntut Umum berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dan karenanya minta supaya Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang diuraikan tersebut di atas yang didasarkan adanya alat bukti Saksi, Surat serta keterangan Terdakwa sendiri yang bersangkutan paut satu dengan lainnya, maka terbukti fakta-faktya sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi serempetan antara sebuah motor dan sepeda di jalan Raya Cirebon – Tegal di Desa Kalipasung;
- Bahwa benar akibat serempetan tersebut pengemudi sepeda maupun pengemudi motor jatuh;
- Bahwa benar pengemudi sepeda nama KERI dan yang mengemudi motor nama TONI jatuh tergeletak di pinggir jalan tidak sadarkan diri;
- Bahwa benar TONI luka parah di belakang kepala dan luka parah;

- Bahwa benar Terdakwa emosi dan akan melakukan pemukulan terhadap TONI akan tetapi berhasil dicegah;
- Bahwa benar kemudian korban TONI meninggal dunia di Rumah Sakit Gunung Jati;

Menimbang, bahwa sekarang perlukah dibuktikan apakah fakta-fakta yang terbukti di sidang tersebut memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (1), (2) dan (3) KUHP;

Bahwa unsur-unsur Pasal tersebut yaitu:

ayat 1 : sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka;

ayat 2 : mengakibatkan luka berat;

ayat 3 : mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dapat dibuktikan adanya niat (opzet) dari Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, karena hal demikian itu disyaratkan oleh Pasal 197 ayat (1) sub. b KUHP. Dalam hal mempertimbangkan keputusan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa memang telah terjadi kecelakaan lalu-lintas dan ada dua orang korban yang masing-masing tidak sadarkan diri;

Bahwa khusus mengenai korban TONI, benar korban menderita luka berat di bagian belakang kepala dan berdarah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di sidang, benar WARDI (Terdakwa) emosi mendengar dan melihat adiknya KERI tergeletak yang dikira mati;

- Bahwa untuk melampiaskan emosinya tersebut WARDI (Terdakwa) mau memukul korban yang bernama TONI yang dikira sebagai yang mengendarai motor;
- Bahwa niat Terdakwa tersebut tidak terlaksana karena dicegah dan ditarik Saksi SAMINTA dan DIDI IMAN SETIADI bin NAHROWI;
- Bahwa yang mengetahui Terdakwa WARDI bin DELAP melakukan pemukulan terhadap diri TONI, hanya seorang saksi saja yaitu ROSIDI bin ABUBAKAR, tanpa dikuatkan oleh bukti lainnya;
- Bahwa oleh karenanya keterangan Saksi tersebut tidak dapat dipakai sebagai dasar penentuan kesalahan Terdakwa, karena satu saksi bukan saksi (*unus tertstis nulus testis*);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut unsur sengaja (opzet) tidak dipenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur:

- menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka;
- mengakibatkan luka berat;
- mengakibatkan mati;

akan diuraikan dan dipertimbangkan dibawah ini :

- Bahwa kenyataanya korban TONI meninggal dunia tidak lama setelah kejadian, karena luka-luka di kepala bagian belakang;
- Bahwa TONI sudah lama keadaan luka-luka sewaktu jatuh dari sepeda motor karena serempetan tersebut;

Menimbang. bahwa atas dua hal tersebut TONI (korban) telah dalam keadaan sakit, menderita luka parah serta tidak sadarkan diri;

Bahwa luka-luka tersebut akibat jatuh dari atas motor ke aspal di jalan Raya Cirebon _ Tegal;

Menimbang, bahwa dengan demikian keadaan sakit luka parah korban TONI memang akibat jatuh dari motor ke atas jalan Raya Cirebon- Tegal;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang didasarkan keterangan Saksi, Terdakwa maupun barang bukti ternyata unsur sebagaimana dimaksud Pasal 351 ayat (1), (2) dan (3) KUHP tidak dapat dipenuhi dan dengan tepatlah Requisitor Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1), Pasal 197 dan Pasal 222 KUHP.

MENGADILI

Menyatakan bahwa Terdakwa :

SUPANDI alias WARDI bin DELAP

Tidak terbukti bersalah melakukan kejahatan sebagaimana disebutkan dalam tuduhan Pasal 351 ayat (1), (2) dan (3) KUHP, oleh karena itu membebaskan ia dari segala tuduhan :

1. Menetapkan biaya perkara ditanggung Negara.
2. Memerintahkan supaya Terdakwa dibebaskan.

3. Menetapkan berupa Visum et Repertum tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini.

2. Pembahasan

Dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP dinyatakan bahwa “*keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.*”

Berpedoman pada ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP di atas, maka keterangan seorang saksi agar dapat membuktikan kesalahan terdakwa yang didakwakan kepadanya harus didukung oleh alat bukti lainnya. Dalam pembuktian di pengadilan maka keterangan saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti apabila bukan berasal dari satu saksi saja, artinya bahwa keterangan dari seorang saksi tidak cukup sebagai alat bukti, Tetapi keterangan seorang saksi dapat dianggap sebagai alat bukti apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya, hal ini terdapat dalam Pasal 185 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Keterangan seorang saksi yang berdiri sendiri, disebut dengan istilah *unus testis nulus testis* (satu saksi bukan saksi).

Berdasarkan tafsir *acontrario* (analogi) keterangan seorang saksi cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang lain, misalnya :

- a) satu keterangan saksi ditambah keterangan terdakwa.
- b) satu keterangan saksi ditambah alat bukti surat.

Mengenai ketentuan “satu saksi bukan saksi” menurut Mr. Modderman dalam bukunya “*De Wettelijk bewijsler in strafzaken* hal 225 (A. Karim Nasution, 1975: 11-46) mengemukakan bahwa inti sebenarnya dari aturan tersebut bukanlah terletak pada angkanya, karena tidaklah ada

suatu alasan untuk mengatakan bahwa keterangan seorang saksi kurang dipecayai kejujurannya, dibanding dengan keterangan dua orang saksi, tapi alasannya adalah bahwa dengan keterangan seorang saksi saja, maka kemungkinan untuk mengadakan pengecekan timbal balik antara alat-alat bukti akan tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu untuk pembuktian yang sah diperlukan sekurang-kurangnya dua kesaksian, untuk dapat menghukum atas dasar dua kesaksian tidaklah disyaratkan bahwa harus ada persesuaian tertentu antara kedua kesaksian tersebut, tetapi yang penting terdapat titik pertemuan antara satu sama lain (Hari Sasangka, Lily Rosita, 2003: 42).

Berkaitan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP bahwa keterangan satu saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang di dakwakan kepadanya, dalam hal ini sebenarnya bukan hanya keterangan satu orang saksi yang dianggap tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang di dakwakan kepadanya, tetapi walaupun jumlah saksi yang dihadirkan dalam persidangan banyak tapi apabila keterangan dari masing-masing saksi tersebut saling berdiri sendiri dan tidak bersesuaian satu sama lain sehingga tidak dapat menyimpulkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu maka kesaksian seperti ini dapat di golongan sebagai saksi tunggal, maka dapat dikatakan bahwa keterangan saksi yang seperti ini juga tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa.

Masyarakat sering memberikan pendapat yang keliru, dengan adanya beberapa saksi dianggap keterangan saksi yang banyak itu telah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Pendapat yang demikian keliru, karena sekalipun saksi yang dihadirkan dan didengar keterangannya disidang pengadilan secara “kuantitatif” telah melampaui batas minimum pembuktian, belum tentu keterangan mereka secara “kualitatif” memadai sebagai alat bukti yang sah membuktikan kesalahan terdakwa. Tidak ada gunanya menghadirkan saksi yang banyak, apabila secara kualitatif

keterangan mereka saling “berdiri sendiri” tanpa adanya saling hubungan antara yang satu dengan yang lain; yang dapat mewujudkan suatu kebenaran akan adanya kejadian atau keadaan tertentu. Berapapun banyaknya saksi yang diperiksa dan didengar keterangannya disidang pengadilan, hanya pemborosan waktu jika masing-masing keterangan mereka itu berdiri sendiri tanpa hubungan antara yang satu dengan yang lain. Hal seperti ini dapat dilihat pada putusan Mahkamah Agung tanggal 17-4-1978, No. 28 K/Kr./1977 yang menegaskan “ keterangan saksi satu saja, sedang terdakwa memungkiri kejahatan yang dituduhkan kepadanya dan keterangan saksi-saksi lainnya tidak memberi petunjuk terhadap kejahatan yang dituduhkan, belum dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa”.

Selanjutnya dalam Pasal 185 ayat (4) KUHAP telah ditegaskan bahwa:

- i. keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, dengan syarat,
- ii. apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Dari ketentuan Pasal 185 ayat (4) maka dapat disimpulkan bahwa keterangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian, apabila keterangan para saksi tersebut mempunyai saling hubungan serta saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu.

Pengertian mengenai kesaksian yang berdiri sendiri ada dua definisi, yaitu:

- (1) Dalam suatu sidang terdapat banyak saksi yang dihadirkan, dan keterangan masing-masing saksi tersebut saling berdiri sendiri, tetapi keterangan yang berdiri sendiri tersebut saling berhubungan dan dapat

menyimpulkan atau membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan dapat menunjukkan pelakunya.

Dari pengertian tersebut dapat di contohkan sebagai berikut:

Seorang saksi menerangkan bahwa ia melihat si A (terdakwa) pada jam 12.00 tengah hari tanggal 1 mei 1993 berjalan di jalan Tebet Barat Raya, Jakarta. Saksi kedua menerangkan bahwa ia melihat si A (terdakwa) masuk kepekarangan rumah nomor 4 di jalan tersebut pada kira-kira jam 12.00. Saksi ketiga menerangkan bahwa ia melihat si A (terdakwa) menunggu dan naik taksi pada jam 13.00 tanggal 1 mei 1993 di tepi jalan Tebet Barat Raya Jakarta sambil membawa Televisi.

Keterangan saksi-saksi tersebut di atas saling berdiri sendiri, tetapi keterangan mereka saling berhubungan dan dapat menyimpulkan atau membenarkan adanya suatu kejadian dan dapat dijadikan bukti bahwa si A (terdakwa) telah mencuri televisi kepunyaan si C di rumah nomor 4 jalan Tebet Barat Raya Jakarta yang melaporkan kepada polisi bahwa ia telah kehilangan sebuah televisi di rumah tersebut kira-kira pada jam 12.00 tanggal 1 mei 1993 (Andi Hamzah, 2002: 266).

Jadi disini dapat disimpulkan bahwa keterangan beberapa saksi yang berdiri sandiri tetapi keterangan dari beberapa saksi tersebut dapat menyimpulkan atau membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu serta dapat menunjuk siapa pelakunya, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, sehingga keterangan seperti ini mempunyai nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi.

- (2) Dalam suatu persidangan terdapat banyak saksi yang dhadirkan, tetapi keterangan yang diberikan dari saksi –saksi tersebut, antara saksi yang satu dengan saksi yang lain saling berdiri sendiri dan tidak ada hubunganya atau tidak bersesuaian satu sama lain dan dapat dikatakan keterangan mereka saling bertentangan, jadi keterangan saksi-saksi

tersebut tidak dapat menyimpulkan adanya suatu kejadian atau peristiwa tertentu dan tidak dapat menunjuk siapa pelakunya.

Kesaksian yang berdiri sendiri yang dimaksud oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah kesaksian yang berdiri sendiri seperti yang dimaksud pada nomor dua yaitu kesaksian yang berdiri sendiri dimana antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling berdiri sendiri dan tidak ada hubungannya atau tidak bersesuaian dan dapat dikatakan keterangan mereka saling bertentangan, jadi keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat menyimpulkan adanya suatu kejadian atau peristiwa tertentu dan tidak dapat menunjuk siapa pelakunya.

Mengenai kesaksian seperti yang disebutkan pada nomor 2 di atas maka untuk mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian dari kesaksian tersebut kita dapat berpijak pada contoh kasus yang kami uraikan di muka, yaitu perkara Penganiayaan di Pengadilan Negeri Sumber Nomor: 54/Pid.S/1982/PN.Sbr

Dalam perkara penganiayaan tersebut terdapat dua belas saksi yang dihadirkan dalam persidangan, dimana atas keterangan saksi-saksi tersebut hanya satu saksi yaitu Saksi ROSIDI bin ABUBAKAR yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban TONI, dimana keterangan tersebut dibantah oleh terdakwa SUPANDI alias WARDI. Dan keterangan saksi-saksi yang lain menyatakan bahwa tidak terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa SUPANDI alias WARDI terhadap TONI, saksi-saksi lain tidak melihat adanya pemukulan, tetapi keterangan saksi-saksi lain menyatakan bahwa benar terdakwa SUWANDI telah emosi dan akan melakukan pemukulan terhadap toni, akan tetapi dapat dicegah oleh Saksi SAMINTA dan DIDI IMAN SETIADI sehingga tidak terjadi pemukulan. Dan saksi-saksi yang lain tidak melihat adanya pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap TONI.

Dengan demikian keterangan saksi ROSIDI bin ABUBAKAR tidak berhubungan dengan keterangan saksi-saksi lain dan tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi yang lain, maka dapat dikatakan bahwa keterangan saksi ROSIDI bin ABUBAKAR merupakan kesaksian yang berdiri sendiri. Dalam kasus tersebut di atas yaitu Kasus perkara Penganiayaan di Pengadilan Negeri Sumber Nomor: 54/Pid.S/1982/PN.Sbr dimana dalam kasus tersebut majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa SUPANDI alias WARDI tidak bersalah melakukan kejahatan penganiayaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 351 ayat (1), (2) dan (3) KUHP. Karena beberapa pertimbangan yang intinya adalah bahwa yang mengetahui Terdakwa WARDI bin DELAP melakukan pemukulan terhadap diri TONI, hanya seorang saksi saja yaitu ROSIDI bin ABUBAKAR, tanpa dikuatkan oleh bukti lain dan Bahwa oleh karenanya keterangan Saksi ROSIDI bin ABUBAKAR tersebut tidak dapat dipakai sebagai dasar penentuan kesalahan Terdakwa, karena tidak didukung keterangan saksi-saksi yang lain atau dengan kata lain satu saksi bukan saksi (*unus tertstis nulus testis*).

Dari uraian tersebut di atas maka dapat kita simpulkan bahwa kesaksian yang berdiri sendiri, dimana antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain tidak saling berhubungan atau tidak bersesuaian sehingga tidak dapat menyimpulkan adanya suatu peristiwa atau keadaan tertentu dan tidak dapat pula menyimpulkan siapa pelakunya, maka keterangan seperti ini tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Dalam Pasal 185 ayat (2) KUHP jelas dinyatakan bahwa “ keterangan satu saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang di dakwakan”. Dari pengertian Pasal tersebut di perjelas lagi dengan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Sumber yang memutus bebas terdakwa dengan alasan bahwa hanya ada satu saksi saja yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan maka keterangan saksi tersebut tidak dapat

dipakai sebagai dasar penentuan kesalahan karena tidak didukung keterangan saksi-saksi yang lain atau dengan kata lain satu saksi bukan saksi (*unus testis nulus testis*), maka dapat dikatakan pula bahwa keterangan saksi yang berdiri sendiri tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Selanjutnya mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang berdiri sendiri, dimana antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain tidak saling berhubungan atau tidak bersesuaian sehingga tidak dapat menyimpulkan adanya suatu peristiwa atau keadaan tertentu dan tidak dapat pula menyimpulkan siapa pelakunya, dalam Pasal 185 ayat (4) juga dengan tegas dinyatakan bahwa “keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian tertentu”. Maka berdasarkan Pasal 185 ayat (4) jelaslah bahwa keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lain dan tidak dapat menyimpulkan adanya suatu peristiwa atau keadaan dan siapa pelakunya, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, masing-masing akan dikategorikan sebagai saksi tunggal yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Akan tetapi walaupun kesaksian yang berdiri sendiri tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti keterangan saksi, dapat dijadikan sebagai petunjuk bagi hakim dalam mengambil putusan di persidangan.

B. Tindakan Hakim Untuk Mengambil Putusan Terhadap Adanya Kesaksian Yang Berdiri Sendiri Dalam Proses Persidangan.

Dalam pembuktian hukum acara pidana dikenal adanya asas minimum pembuktian, yaitu prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi untuk

membuktikan kesalahan terdakwa. Atau dengan kata lain asas minimum pembuktian adalah suatu prinsip yang harus dipedomani hakim dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa.

Mengenai asas minimum pembuktian ini, didasarkan pada Pasal 183 KUHAP yang menyatakan *“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakalah yang melakukannya”*. Jadi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus sangat memperhatikan asas tersebut, yaitu harus didukung dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim mendapatkan keyakinan terhadap adanya suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

Dalam hukum acara pidana terdapat lima alat bukti yang sah yang dapat dipakai bagi hakim untuk pembuktian dalam persidangan. Ini terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

1. keterangan saksi
2. keterangan ahli
3. surat
4. petunjuk
5. keterangan terdakwa.

Apabila ketentuan dalam Pasal 183 dihubungkan dengan jenis alat bukti tersebut maka terdakwa baru dapat dijatuhi hukuman pidana apabila dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Jadi untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya atau paling sedikit dua alat bukti yang sah dan ditambah dengan keyakinan hakim.

Berbicara mengenai keyakinan hakim ini, memang keyakinan hakim bersifat subyektif yaitu dari pribadi hakim itu sendiri. Akan tetapi walaupun

demikian untuk memperoleh suatu keyakinan terhadap tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa, seorang hakim tetap memperhatikan terhadap adanya alat bukti serta barang bukti yang ada dalam persidangan. Hakim memperhatikan kesinkronan, kesesuaian atau kecocokan antara alat-alat bukti dengan barang bukti yang ada dalam persidangan. Dengan kata lain bahwa hakim tidak lantas bebas atau sewenang-wenang menyatakan bahwa dia yakin terhadap kesalahan terdakwa tanpa memperdulikan alat-alat bukti dan barang bukti yang ada tanpa didasari alasan yang kuat, akan tetapi dalam hal ini hakim tetap berpedoman atau berpatokan terhadap alat bukti dan barang bukti yang ada. Dan apabila dikaitkan dengan teori pembuktian maka termasuk sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif.

Apabila dalam suatu persidangan terjadi kesaksian yang berdiri sendiri, yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Maka disini hakim akan mencari alat-alat bukti lain yang sah untuk memenuhi batas minimum pembuktian dan untuk menumbuhkan keyakinan terhadap tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.

Setidaknya dengan adanya keterangan saksi sebagai alat bukti dalam persidangan, walaupun keterangan dari saksi-saksi tersebut saling berdiri sendiri dan tidak bersesuaian satu sama lain, sehingga tidak dapat menyimpulkan adanya suatu kejadian atau peristiwa tertentu dan tidak dapat pula menyimpulkan siapa pelakunya sehingga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, akan tetapi keterangan yang demikian dapat digunakan sebagai petunjuk bagi hakim. Karena seperti disebutkan dalam Pasal 188 ayat 2 KUHAP dimana petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan ahli.

Memang keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama dalam perkara pidana, akan tetapi keterangan saksi bukan merupakan satu-satunya alat bukti dalam hukum acara pidana, tapi masih ada alat-alat bukti lain yang

sah. Untuk memenuhi batas minimum pembuktian hakim masih dapat menggunakan alat bukti lain seperti : keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Apabila dari alat-alat bukti lain ini dapat ditemukan alat-alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan hakim yakin bahwa terdakwalah yang melakukannya maka tidak menutup kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Walaupun dalam persidangan terdapat keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak menutup kemungkinan bagi hakim untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, yaitu apabila dari alat-alat bukti lain yang ada telah memenuhi batas minimum pembuktian dan hakim juga yakin bahwa tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa benar-benar terjadi dan hakim yakin pula siapa pelakunya. Jadi bukan berarti apabila dalam persidangan terjadi kesaksian yang berdiri sendiri lantas hakim harus memutus bebas terdakwa, tetapi hakim tetap mempertimbangkan alat-alat bukti lain, barang bukti dan dari keyakinan hakim itu sendiri. Karena pada prinsipnya kekuatan pembuktian dari keterangan saksi adalah tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, jadi hakim mempunyai kebebasan untuk menilai keterangan saksi.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Dari perumusan masalah yang penulis kemukakan serta pembahasannya baik yang berdasarkan atas teori maupun data-data yang penulis dapatkan selama mengadakan penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Kesaksian yang berdiri sendiri, dimana antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain tidak saling berhubungan atau tidak bersesuaian sehingga tidak dapat menyimpulkan adanya suatu peristiwa atau keadaan tertentu dan tidak dapat pula menyimpulkan siapa pelakunya, maka kesaksian seperti ini tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Karena kesaksian yang demikian dapat digolongkan sebagai saksi tunggal atau *unus testis nulus testis* (satu saksi bukan saksi). Akan tetapi kesaksian semacam ini dapat dijadikan petunjuk bagi hakim dalam menjatuhkan putusan di persidangan.

Tindakan hakim untuk mengambil putusan terhadap adanya kesaksian yang berdiri sendiri dalam proses persidangan adalah :

Hakim akan mencari alat-alat bukti lain yang sah untuk memenuhi batas minimum pembuktian, yang nantinya akan dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. jadi bukan berarti bahwa apabila dalam proses persidangan terdapat kesaksian yang berdiri sendiri lantas hakim memutus terdakwa tidak bersalah. Karena walaupun dalam persidangan terdapat kesaksian yang berdiri sendiri dimana kesaksian semacam ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian, akan tetapi masih ada alat bukti lain yang mungkin mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti serta barang bukti yang ada, apakah terdapat kesesuaian dari alat bukti dan barang bukti tersebut. Dengan demikian⁶³ dapat menumbuhkan keyakinan hakim, yang nantinya dijadikan sebagai pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka sebagai akhir dari seluruh tulisan ini, dapat diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam pembuktian di persidangan, hakim harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti bahwa seseorang yang telah melanggar ketentuan pidana atau undang-undang pidana lainnya, harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Sedangkan kepentingan terdakwa berarti bahwa terdakwa harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa, sehingga tidak ada seorang yang tidak bersalah mendapat hukuman. Dan bila memang terbukti bersalah maka hukuman itu harus seimbang dengan kesalahannya.
2. Hakim hendaknya cermat dan teliti dalam menilai alat bukti keterangan saksi, Karena dalam hukum acara pidana alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Jadi dalam hal ini sangat berkaitan sekali dengan masa depan dan kehidupan seseorang
3. Hakim dalam sidang maupun dalam pertimbangannya harus meneliti dengan cermat, teliti dan sungguh-sungguh saling persesuaian maupun pertentangan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain tersebut guna mendapatkan kebenaran sesuai dengan keyakinannya.
4. Bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menghadirkan para saksi dalam persidangan hendaknya memang saksi-saksi yang berkualitas. Kualitas di sini dilihat dari segi keterangan yang diberikan, keterangan yang diberikan harus dapat menyimpulkan adanya tindak pidana dan siapa pelakunya, serta adanya saling kesesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Paslyadja. 1997. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pusat Diktat Kejaksaan Republik Indonesia.
- Andi Hamzah. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : PT. Sinar Grafika
- Burhan Ashshofa. 2000. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darwan Prinst. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan
- Djoko Prakoso. 1988. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta : Liberty
- Hamrat Hamid dan Hasan M. Husein. 1992. Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan dan Eksekusi: Dalam Tanya jawab. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung : Mandar Maju
- _____. 2003. *Komentar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. Bandung: Mandar Maju.
- Heribertus Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Matthew B. Milles dan A. Michael Hubberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif (diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi)*. Jakarta: UI-Press.
- Moeljatno. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta : Bumi Aksara.
- M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* :Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. 2001. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soerjono Soekanto. 1986 . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.

Sudarsono. 2002. *Kamus Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta

Sutrisno Hadi. 2002. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi

Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum, Departemen
Kehakiman. *Himpunan Putusan-Putusan Pengadilan
Negeri, Semester II, Jilid I. Pidana dan Acara Pidana*.
Jakarta.